

## **Inkonsistensi Kebijakan Transisi Energi pada Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia dan Korelasinya terhadap Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat**

Riswandha Imawan\* dan Fajar Winarni\*\*

### **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inkonsistensi kebijakan energi pada sektor ketenagalistrikan dalam pelaksanaan transisi energi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami mengenai korelasi antara kebijakan energi pada sektor ketenagalistrikan terhadap pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia.

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian normatif yang ditinjau dari sifatnya merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun data penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Terdapat dua kesimpulan dari penelitian ini. *Pertama*, kebijakan energi pada sektor ketenagalistrikan di Indonesia belum menunjukkan konsistensi dalam mendukung pelaksanaan transisi energi. Inkonsistensi ini terdapat pada Kebijakan Energi Nasional, Rencana Umum Energi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019-2038. Inkonsistensi kebijakan transisi energi tersebut dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan yang memiliki dasar pembenaran. Dasar pembenaran dari penyimpangan tersebut adalah alasan keseimbangan ekonomi nasional. *Kedua*, kebijakan energi pada sektor ketenagalistrikan dapat berkorelasi terhadap pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia. Kebijakan transisi energi pada sektor ketenagalistrikan dapat meminimalisir dampak negatif penggunaan energi fosil, sehingga dapat membantu mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat. Selain itu, kebijakan transisi energi pada sektor ketenagalistrikan tersebut juga dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia.

**Kata Kunci: Hak atas Lingkungan, Konsistensi Kebijakan, Transisi Energi**

---

\* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

\*\* Ketua Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

***Inconsistency of Energy Transition Policy in the Electricity Sector in Indonesia and its Correlation to the Fulfillment of the Right to a Good and Healthy Environment***

Riswandha Imawan\* and Fajar Winarni\*\*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the inconsistency of energy policy in the electricity sector on the implementation of energy transition in Indonesia. In addition, this research also aims to understand the correlation between energy policies in the electricity sector and the fulfillment of the right to a good and healthy environment in Indonesia.*

*This research is categorised as a type of normative research which in terms of its characteristics is descriptive research. This research was conducted using a statutory approach and concept approach. The research data used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, the data was analysed with a qualitative descriptive method.*

*There are two conclusions from this research. First, energy policy in electricity sector in Indonesia has not shown consistency in supporting the implementation of energy transition. This inconsistency is found in the National Energy Policy (KEN), National Energy General Plan (RUEN), Presidential Regulation No. 112 of 2022 on Acceleration of Renewable Energy Development for Electricity Supply, and National Electricity General Plan 2019-2038. The inconsistency of the energy transition policy is categorized as a form of deviation that has a justification. The justification for the deviation is the national economic balance. Second, energy policy in the electricity sector can correlate to the fulfillment of the right to a good and healthy environment in Indonesia. The energy transition policy in the electricity sector can minimize the negative impacts of fossil energy use, so that it can help realize better and healthier environmental conditions. In addition, the energy transition policy in the electricity sector can be an important part to support the fulfillment of the right to a good and healthy environment in Indonesia.*

***Keywords: Energy Transition, Policy Consistency, Right to Environment***

---

\* Magister of Legal Science Student, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

\*\* Head of Environmental Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.